Majelis Internasionalis Anti-Perang

Dari Gaza ke Konflik Global:

Perang Kapitalis dan Solidaritas Internasionalis

Gaza: Dari serangan genosida hingga pengungsian massal dan pembersihan etnis

Selama lebih dari 20 bulan, Israel telah melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap penduduk Palestina di Gaza. Perang yang dilancarkan Israel secara sengaja menyasar warga sipil, mencapai proporsi genosida dan hampir menghancurkan infrastruktur, rumah, rumah sakit, sekolah, dan kehidupan manusia. Hal ini telah menyebabkan pengusiran massal warga Palestina dari rumah mereka, yang pada akhirnya bertujuan untuk pembersihan etnis guna memfasilitasi perluasan permukiman dengan visi membangun “Israel Raya”. Bersamaan dengan itu, operasi militer Israel di Gaza dan wilayah yang lebih luas (Lebanon, Suriah, Iran) menjadi ujung tombak bagi blok imperialis “Barat” untuk mengubah dinamika kekuatan dan memaksakan tatanan baru di Timur Tengah, yang secara langsung terkait dengan konflik yang lebih luas antara blok-blok imperialis. Terbukti, operasi

militer ini telah membuahkan hasil, melemahkan Hizbullah di Lebanon, berkontribusi pada jatuhnya Assad, melemahkan pengaruh Rusia di Suriah, dan memberikan pukulan telak bagi Iran.

Perluasan perang di Timur Tengah: Krisis Kapitalis dan Persaingan Imperialis

Perluasan perang di Timur Tengah ini, dengan dukungan aktif AS dan keterlibatan langsungnya dalam konflik militer, menandai eskalasi kualitatif. Bahaya perang regional yang lebih luas, dan mungkin juga perang global, kini lebih nyata daripada sebelumnya, sebagaimana ditegaskan oleh perang yang berkelanjutan antara Ukraina dan Rusia, meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Taiwan, konflik Pakistan-India, persenjataan kembali yang cepat di negara-negara Eropa, dan upaya untuk memperkuat militerisme dan militerisasi masyarakat di seluruh dunia. **Krisis kapitalis inilah yang mendorong meningkatnya persaingan antarnegara dan eskalasi konflik militer.** Perang bertindak sebagai "penghancuran kreatif" dan sebagai mekanisme untuk mengatasi stagnasi dan mereproduksi dominasi kapitalis, antara lain, melalui pembersihan proletariat yang surplus secara brutal.

Warga Palestina di Gaza sebagai kaum proletar surplus dan berbagai aspek rasisme anti-Palestina

Hal ini secara tepat menggambarkan kondisi mayoritas penduduk Palestina di Gaza. Pada tahun 1980-an, hampir 45% penduduk Gaza bekerja di Israel dengan upah rendah tanpa hak-hak buruh. Tanpa perlindungan yang diberikan kepada

kelas pekerja Israel, warga Palestina menjadi pasukan cadangan tenaga kerja murah. Selama tahun 1990-an, pekerja Palestina semakin digantikan oleh migran dari Thailand, Filipina, dan Rumania, yang saat ini merupakan angkatan kerja paling tereksploitasi di Israel, seringkali berpenghasilan lebih rendah daripada warga Palestina. Sejak tahun 2007, dengan blokade total Gaza oleh Israel dan Mesir, serta pembentukan rezim pengepungan, hingga 7 Oktober 2023, jumlah penduduk Gaza yang bekerja di Israel berkurang menjadi hanya 1% dari populasi. Perekonomian Gaza mengalami kerusakan besar, dengan impor dan ekspor yang dilakukan secara ilegal melalui terowongan di perbatasan Mesir, yang menyebabkan tingkat pengangguran sekitar 50% dan hampir separuh penduduk Gaza bergantung sepenuhnya pada program bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Jelas, populasi ini mewakili surplus proletariat yang sepenuhnya dapat dibuang, baik dari perspektif ekonomi Israel maupun penegakan “kemurnian nasional” di kawasan tersebut. Hal ini telah mendorong rasisme ekstrem terhadap penduduk Palestina di Gaza dalam masyarakat Israel, mencapai titik dehumanisasi. Warga Palestina dicap sebagai “manusia hina”, dan bahkan presiden Israel, yang berafiliasi dengan Partai Buruh, menyatakan bahwa di Gaza “tidak ada orang yang tidak bersalah”. Ideologi negara nasionalis ini semakin melegitimasi pembantaian dan perang dalam masyarakat Israel, membangun narasi defensif yang dibutuhkan negara Israel untuk membenarkan agresi militer di Gaza, dan mengartikulasikan ambisi ekspansionis teritorial Israel.

Namun, rasisme anti-Palestina juga terjadi di banyak negara Arab. Mayoritas pengungsi Palestina tetap tidak berdokumen dan tanpa kewarganegaraan di negara-negara Arab tetangga,

seringkali terkurung di kamp-kamp pengungsian tanpa kebebasan bergerak. Mereka diperlakukan sebagai orang luar, sebagai beban bagi perekonomian lokal, dan sebagai "badan asing" bagi penduduk lokal, sebagaimana yang terjadi saat ini dengan para pengungsi di seluruh dunia, yang dijadikan kambing hitam atas permasalahan sosial. Lebih lanjut, mereka dipandang sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas, dengan segmen pengungsi Palestina yang teradikalisasi secara politik secara historis terlibat dalam konflik bersenjata dengan otoritas negara (misalnya, "September Hitam" di Yordania), berpartisipasi dalam perang saudara Lebanon, dan mendukung Irak selama invasi Kuwait, yang mengakibatkan pengungsian 300.000 hingga 400.000 warga Palestina dari Kuwait setelah tahun 1991 dan pembatasan migrasi yang lebih ketat di negara-negara Teluk lainnya. Kaum proletar Palestina secara konsisten diperlakukan oleh negara-negara Arab sebagai pion, alih-alih manusia, dalam papan catur diplomatik dan militer Timur Tengah.

Di Eropa dan, lebih luas lagi, di dunia "Barat", rasisme anti-Palestina telah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir sebagai bentuk rasisme yang lebih luas terhadap Muslim, yang telah dipromosikan secara sistematis dalam beberapa tahun terakhir oleh teori-teori sayap kanan ekstrem tentang "penggantian besar-besaran" dan kepanikan moral yang dipupuk oleh pemerintah—baik sosial demokrat maupun sayap kanan—terhadap masuknya Muslim ke Barat. Ketidakpuasan atas menurunnya standar hidup dengan demikian diarahkan kepada segmen kelas kita yang paling rentan, mengalihkan kemarahan dari hubungan sosial kapitalis. Israel digambarkan dalam narasi-narasi rasis yang menjijikkan ini sebagai benteng "peradaban Barat" melawan "barbarisme Islam". Hal ini tampak

paradoks mengingat retorika sayap kanan ekstrem yang mengaitkan rencana “penggantian populasi” dengan “elit global” secara struktural bersifat antisemit. Sebaliknya, solidaritas dengan Palestina, yang juga tumbuh di dalam kelompok sosial paling progresif, seringkali tidak memiliki muatan kelas dan diartikulasikan berdasarkan mitologi reaksioner tentang karakter revolusioner Hamas dan organisasi-organisasi sekutunya, yang pada kenyataannya mewakili kebijakan penindasan nasionalis dan kapitalis, yang seringkali terkait erat dengan ideologi agama yang statis. Kita telah menyaksikan posisi ini berkembang lebih jauh dengan dukungan terbuka dari negara-negara seperti Iran dan Rusia, yaitu, dukungan dari salah satu kubu imperialis. Mengenai Hamas, tidak diragukan lagi bahwa personel politik dan militer dari sebagian kelas penguasa Palestinalah yang menjalankan kekuasaan di Gaza. Dengan demikian, Hamas berpartisipasi dalam eksploitasi proletariat Palestina baik sebagai tenaga kerja—melalui pengenaan pajak dan bea atas perdagangan yang dilakukan melalui terowongan—maupun melalui ekstraksi pendapatan dari pengelolaan “bantuan kemanusiaan” untuk kebutuhan penduduk dan dukungan finansial dari Iran dan Qatar. Hamas dan organisasi-organisasi afiliasinya memiliki monopoli atas kekerasan dan persenjataan, berbeda dengan segala bentuk kekerasan revolusioner berbasis kelas. Di sisi lain, sebagian besar penduduk Gaza tetap merupakan kaum proletar surplus yang dapat dibuang—umpan meriam.

Hamas dan perangkap kampisme “anti-imperialis”

Atas dasar ini, serangan 7 Oktober oleh Hamas dan para kolaboratornya di Israel merupakan tindakan perang oleh pihak yang hingga saat itu merupakan otoritas negara de facto di

Gaza. Serangan tersebut bukanlah tindakan perlawanan oleh suatu gerakan, juga tidak memiliki karakter proletar atau revolusioner. Serangan tersebut tidak dapat berfungsi sebagai model atau kompas bagi perjuangan proletar. Tujuan utamanya adalah untuk membalikkan situasi yang terbentuk dengan Perjanjian Abraham dan mengubah keseimbangan geopolitik di Timur Tengah. Kedua, serangan tersebut berfungsi sementara untuk mengatasi krisis legitimasi internal Hamas di Gaza—sebagaimana ditunjukkan oleh demonstrasi massa baru-baru ini terhadap Hamas. Mengingat hasilnya, yaitu respons yang sangat keji dari negara Israel, serangan tersebut tidak melayani – dan tidak mungkin melayani – kepentingan dan kebutuhan penduduk Palestina, yang telah hidup dalam kondisi apartheid dan penggusuran oleh negara Israel. Serangan tersebut menargetkan target militer dan non-militer dan berusaha meneror penduduk musuh, seperti halnya tindakan militer negara , meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil. Namun, menghitung mayat dan membandingkan pembantaian adalah hal yang asing bagi perspektif proletar mana pun. Mayoritas korban perang kapitalis adalah korban tewas kita sendiri.

Yunani di pihak Israel: Kepentingan Ekonomi dan Persaingan Geopolitik

Sebagaimana telah disebutkan, perang di Gaza merupakan bagian dari konflik imperialis yang lebih luas. Negara Yunani telah menyeret kita jauh ke dalam konflik ini, meningkatkan anggaran militer, menyediakan fasilitas, dan secara aktif berpartisipasi dalam rencana pertempuran blok “Barat”. Di satu sisi, ada alasan ekonomi langsung mengapa pemerintah Yunani mendukung Israel: kerja sama antara modal Yunani dan Israel, mulai dari persenjataan (INTRACOM Defense)

hingga real estat, dan dari proyek interkoneksi listrik Yunani-Siprus-Israel hingga berbagai kolaborasi sektoral lainnya. Yang lebih penting lagi adalah aliansi antara Yunani dan Israel melawan kekuatan geopolitik Turki yang sedang berkembang. Dalam konteks ini, front informal Yunani-Siprus-Israel telah dibentuk melalui latihan militer gabungan, rencana (yang dibatalkan) untuk membangun jaringan pipa gas alam (EastMed) yang akan melewati jaringan distribusi Rusia, pertukaran informasi, koordinasi diplomatik mengenai definisi Zona Ekonomi Eksklusif, dll. Di sisi lain, terdapat konteks persaingan yang lebih luas antara blok “Barat” dan yang disebut “Eurasia”. Ini termasuk rencana untuk menghubungkan India, Timur Tengah, dan Eropa (IMEC), yang akan melewati rute laut seperti Terusan Suez, Selat Bab el-Mandeb, dan bahkan mungkin Selat Hormuz, sehingga menghilangkan kekuatan geopolitik dari negara-negara yang saat ini mengendalikannya. Rencana ini didukung oleh AS, Uni Eropa, Arab Saudi, UEA, dan India. Sekalipun rencana ini tidak berhasil, sebagaimana yang sering terjadi, ini merupakan metode untuk memberikan pengaruh geopolitik kepada pihak-pihak yang terlibat.

Dari krisis “globalisasi” hingga kapitalisme negara dan ekonomi perang

Dukungan Yunani terhadap Israel tidak semata-mata terkait dengan kepentingan ekonomi langsung modal Yunani atau kepentingan geopolitik langsung negara Yunani. Sebaliknya, hal itu mencerminkan pergeseran yang lebih luas, baik dalam

sistem global negara-bangsa kapitalis maupun rezim akumulasi dalam formasi sosial nasional yang maju secara ekonomi. Krisis kapitalis sejak 2008 juga merupakan krisis model "globalisasi", yang dibuktikan dengan kebangkitan proteksionisme, dengan tarif yang diberlakukan dan ditingkatkan pada perdagangan internasional. Era baru proteksionisme ini bertepatan dengan meningkatnya intervensi negara, menandakan munculnya bentuk baru "kapitalisme negara", yang dicirikan oleh ekonomi perang dan investasi signifikan dari apa yang disebut "dana kekayaan kedaulatan" yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara besar sedang mengembangkan sistem perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan militer mereka, menggantikan hubungan ekonomi global yang diatur pasar, dan meresmikan fase baru reproduksi kapitalis.

Hal ini juga menjadi dasar bagi intensifikasi persaingan imperialis dan konflik militer untuk mengamankan tanah, sumber daya, dan tenaga kerja. Hal ini juga menjadi alasan konsensus lintas partai (kecuali Partai Komunis Yunani) untuk meningkatkan anggaran militer di bawah program ReArm Europe. Blok-blok utama dalam eskalasi baru konflik atas bahan baku, pasar, kepemimpinan teknologi, lingkup pengaruh, dan hegemoni budaya, di satu sisi, adalah AS sebagai kekuatan hegemonik yang ada dan, di sisi lain, Tiongkok sebagai kekuatan imperialis yang sedang berkembang dengan ambisi untuk hegemoni global. AS didukung oleh kekuatan-kekuatan besar Uni Eropa, Jepang, Inggris, dan Australia, bersama dengan Israel dan Arab Saudi; yang menentang mereka, yang bersekutu dengan Tiongkok, adalah Rusia, Belarus, Iran, dan Korea Utara. Negara-negara kuat lainnya di

"Global Selatan"—India, Brasil, Indonesia, dan Afrika Selatan—belum secara definitif bersekutu dengan salah satu blok. Dalam konflik ini, Yunani bersekutu dengan blok imperialis "Barat" dan mendukungnya. Lebih lanjut, melalui partisipasinya dalam konflik ini, Libya berupaya meningkatkan posisi dan kekuatan regionalnya, misalnya melalui kemungkinan pembentukan ZEE yang lebih besar, sebagaimana dibuktikan oleh keberadaan kapal perang di Laut Libya. Tentu saja, formasi ini tidak monolitik dan tidak menghalangi kerja sama antarnegara yang tergabung dalam blok yang berbeda. Lagipula, mereka adalah "saudara musuh": persaingan tidak menghalangi kerja sama, yang dapat berujung pada konflik bersenjata.

Melawan “kampisme” : respon kelas internasionalis terhadap perang kapitalis

Jika kita tidak melawan situasi perang yang semakin memanas ini dengan segala cara, kita akan segera terdesak. Dari perspektif kepentingan proletar, tidak ada perang yang “adil” atau “defensif”. Perbedaan semacam itu merupakan mistifikasi yang menutupi konflik antara kapital nasional dan blok imperialis untuk menguasai pasar modal dan komoditas, wilayah pengaruh, dan tenaga kerja murah. Setiap pihak yang terlibat dalam perang menggambarkan perannya masing-masing sebagai “defensif” dan “adil”. Kemenangan negara yang lebih lemah akan memperkuatnya, memulai kembali siklus setan, sebagaimana telah dibuktikan oleh pengalaman sejarah. Kekalahan negara yang lebih kuat tentu berarti memperkuat negara-bangsa lawan dan menggalang dukungan rakyat. Setiap perlawanan berbasis kelas harus ditumpas untuk menegakkan perdamaian sosial dan persatuan nasional.

Di masa lalu, dukungan terhadap nasionalisme “lemah” dan negara-negaranya masing-masing disamarkan di balik penguatan kubu sosialis. Kini, bahkan tanpa kepura-puraan ini, kritik terhadap kapitalisme ditinggalkan demi pembedaan budaya antara Barat dan Timur atau Utara dan Selatan, sebagaimana diproklamirkan oleh ideologi “anti-kolonial” dan politik identitas kontemporer. Pembedaan ini jelas irasional, mistis, dan reaksioner karena kapitalisme adalah sistem universal dan global: “[ia] telah mengubah seluruh planet menjadi ladang operasinya” meskipun penindasan agama, etnis, dan nasional jelas masih ada dan bukan “hak istimewa” negara-negara tertentu. Dikotomi semu lama yang spektakuler antara kapitalisme versus “sosialisme” telah digantikan oleh dikotomi baru, tanpa kepura-puraan emansipasi sosial, sebagaimana dicontohkan oleh dukungan “anti-imperialis” untuk Iran, Rusia, atau Tiongkok, kecuali untuk seruan “teori tahapan” yang hampa. Mendukung kubu imperialis, atau kampisme, merupakan hal yang inheren dalam ideologi anti-imperialis karena memberikan analisis dari atas ke bawah yang berfokus pada konflik antarnegara, alih-alih perspektif proletar yang berakar pada konflik global antara kapital dan proletariat. Dukungan terhadap kekuatan “pihak lain” dan gerakan pembebasan nasional yang terkait dengannya bahkan tidak dapat menggulingkan imperialisme, yang inheren dalam kapitalisme. Secara objektif, posisi politik yang mendukung satu kubu imperialis membuka jalan bagi militerisasi masyarakat dan perang kapitalis yang lebih luas. Kaum anti-imperialis bahkan sampai mendukung program nuklir yang dianggap “negara lemah”, yang dapat berujung pada puncak perang kapitalis dan kehancuran total.

Satu-satunya jalan keluar dari peperangan yang terus berputar ini adalah aksi internasionalis proletar dengan karakter anti-kapitalis yang jelas. Kami menolak menjadi kaki tangan tentara atau negara mana pun. Kami tidak akan mendukung kubu mana pun yang bertikai. Satu-satunya solusi dalam menghadapi perang adalah organisasi kelas yang otonom dalam perjuangan melawan kapital dan negara di negara kami sendiri dan dukungan praktis bagi mereka yang menolak wajib militer. Ini juga merupakan dukungan bagi para desertir dan penentang wajib militer di “pihak lain” serta solidaritas praktis dengan kolektif politik dan sosial yang berjuang melawan perang kapitalis di Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, Iran, dan di mana pun. Alih-alih praktik semacam itu, yang merupakan syarat minimum yang diperlukan agar tidak menjadi umpan meriam bagi kapital, kami menyaksikan fitnah yang tidak dapat diterima tentang “kolaborasionisme” dan “pengkhianatan nasional” terhadap kawan-kawan anarkis dan komunis dan, lebih luas lagi, kolektif kelas pekerja (misalnya di Iran).

Tepatnya dalam konteks ini, kita harus menyatakan solidaritas kita dengan—meskipun sedikit—para penolak wajib militer di Israel, serta dengan pasukan-pasukan di Israel yang menentang genosida yang sedang dilakukan di Gaza. Identifikasi seluruh penduduk dengan negaranya adalah keliru, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa 100.000 prajurit cadangan tidak melapor untuk bertugas setelah gencatan senjata dilanggar oleh negara Israel. Insiden kebencian nasionalis Israel harus dihadapi ketika terjadi. Logika serangan tanpa pandang bulu terhadap turis Israel bersifat rasis, karena hal itu mengaitkan tanggung jawab kolektif kepada seluruh penduduk, sementara melemahkan arus perlawanan terhadap perang di Israel yang sudah lemah.

Kami menentang perang kapitalis dan segala keterlibatan negara Yunani di dalamnya, menentang militerisasi masyarakat dan peningkatan anggaran militer yang mengorbankan upah sosial. Kami berjuang untuk menciptakan gerakan proletar internasionalis yang tidak tunduk pada kepentingan nasional, negara, dan kapital, serta mengekspresikan solidaritas praktis dengan kolektif proletar, politik—komunis dan anarkis—yang berjuang di negara-negara yang dilanda perang. Tujuan kami adalah membangun ikatan dan komunikasi dengan kaum proletar internasionalis. Hanya melalui persatuan global kaum proletar, kita dapat menggulingkan barbarisme yang dipaksakan oleh negara dan kapital ini. Kita tidak boleh membiarkan diri kita terpojok, melainkan mengakhiri perang kapitalis dengan melawan mereka yang menyebabkannya. **Perang kita bukanlah perang nasional maupun agama. Ini adalah perang kelas sosial yang anti-negara.**